CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
P-ISSN : 2715-2022
E-ISSN: 2829-0585
Vol. 7 No. 2 Edisi September 2026

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENYELESAIAN KONFLIK PEMBUNUHAN MASSAL TAHUN 1966 DI MAUMERE, FLORES TIMUR

Hendrikus Gole[1], Yohanes I Wayan Marianta[2]

[1,2]Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
(herigole@gmail.com[1], jowayansvd@gmail.com[2])

Abstrak

Kasus pembunuhan massal di Maumere tahun 1966 merupakan peristiwa tragis masa lalu bangsa Indonesia. Konflik itu membuat masyarakat merasa takut dan trauma. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berperan penting dalam menangani konflik dan memulihkan kembali hubungan masyarakat. Fokus penelitian ini untuk menyibak nilai dan peran Pancasila dalam mengatasi tragedi pembunuhan massal di Maumere tahun 1966. Tujuan dari studi ini untuk menggali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam mengatasi persoalan masa lalu bangsa pada tahun 1966 di Maumere. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah metode kepustakaan yang bersumber pada buku dan artikel ilmiah yang sesuai dengan diskursus ini. Studi ini menemukan bahwa peran Pancasila menjadi esensi dalam mengatasi persoalan di Indonesia khususnya di Maumere. Sila kelima Pancasila adalah "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia tanpa ada terjadi kesenjangan sosial yang merugikan banyak orang. Sila kelima merupakan fondasi bagi upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil di Indonesia.

Kata Kunci: *Pancasila, Ideologi; Komunisme; Pembunuhan; Maumere*

Abstrac

The Maumere massacre in 1966 was a tragic event in Indonesia's past. The conflict made people feel afraid and traumatized. Pancasila as the ideology of the Indonesian nation plays an important role in handling conflicts and restoring community relations. The focus of this research is to uncover the values and role of Pancasila in overcoming the mass murder tragedy in Maumere in 1966. The purpose of this study is to explore the values of Pancasila as the nation's ideology in overcoming the nation's past problems in 1966 in Maumere. The methodology used in this study is the literature method which is sourced from books and scientific articles that are relevant to this discourse. This study found that the role of Pancasila became essential in overcoming problems in Indonesia, especially in Maumere. The fifth principle of Pancasila is "Social justice for all Indonesian people." This principle emphasizes the importance of social justice in Indonesian society without any social disparities that harm many people. The fifth precept is the foundation for efforts to create a more just society in Indonesia.

Keywords: Pancasila; Ideology; Communism, Murder; Maumere

A. Pendahuluan

Partai komunis di Indonesia (PKI) adalah sebuah partai politik yang memiliki sejarah panjang di Indonesia

Copyright (c) 2026. Darmawan Harefa.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

terutama pada tahun 1965. Pada tahun 1965, partai komunis memiliki pengaruh dalam ranah politik. Pada tahun 1965 bangsa Indonesia mengalami suatu pergolakan atau di sebut sebagai masa kegelapan bangsa. Pada masa ini terjadi peristiwa pembantaian massal yang dilakukan oleh pihak militer terhadap orang yang bergabung dalam partai komunis. Kleden mengatakan, G30S adalah sejarah kelam bangsa Indonesia merdeka yakni yang ditandai dengan konflik pembunuhan massal. Peristiwa ini terjadi di seluruh wilayah bangsa Indonesia baik di Jawa maupun di Maumere, Flores Timur. Konflik pembantaian di Maumere pada tahun 1966 sebagai lanjutan dari peristiwa dari tahun 1965. Tragedi ini menimbulkan rasa sakit bagi para korban dan tragedi ini menimbulkan dendam pada korban dan penyesalan pada pihak yang lain.

Sementara itu, tahun 1965 PKI berkomitmen ingin mengusai pemerintah dengan menuntut supaya dalam ABRI diadakan Nasakomisasi dengan menempatkan komisaris-komisaris politik di dalam angkatan untuk membina ideologi. Partai Komunis Indonesia adalah partai yang berideologi komunis. Dalam sejarah mencatat bahwa organisasi yang bergabung dalam anggota PKI melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926. Dan pada tahun 1948, organisasi ini dituduh sebagai dalang pembunuhan enam jenderal TNI AD di Jakarta pada tanggal 30 September yang dikenal dengan peristiwa G30S/PKI.

Pergolakan politik ini memicu reaksi berantai di seluruh Indonesia termasuk di Maumere. Di berbagai daerah terutama di Pulau Jawa dan Bali terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dianggap PKI atau simpatisan komunis. Bagi masyarakat yang dicurigai bergabung dalam organisasi ini dibunuh dan diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak militer Indonesia. Jumlah korban dari peristiwa ini mencapai sekitar 13.000.00 dan sebanyak 1.308 jiwa ditahan di kamp Papua dan beberapa orang meninggal.

Masyarakat Maumere yang tinggal di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur juga menjadi korban dari peristiwa ini. Bagi masyarakat yang dipandang sebagai golongan PKI mereka dianiaya, ditindas, diusir dan dibunuh. Reaksi kekejaman yang terjadi masa membuat masyarakat merasa trauma dan takut selama bertahun-tahun. Dengan memahami latar belakang konflik pembunuhan massal tahun 1966 di Maumere, sebagai generasi muda berusaha untuk membangun dan mengembangkan semangat rekonsiliasi yang berpusat pada Pancasila.

Tujuan penelitian ini; *Pertama*, untuk memahami peristiwa tragis di Maumere tahun 1966. *Kedua,* meneliti peran Pancasila sebagai Ideologi bangsa dalam menghadapi konflik. *Ketiga,* memberikan

Copyright (c) 2026. Darmawan Harefa.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

sebuah rekomendasi dalam menyelesaikan konflik di Maumere.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur atau *liberary research*, yaitu mempelajari sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ataupun artikel terkait faktor-faktor yang memicu konflik pembunuhan massal tahun 1996. Metode yang digunakan dalam studi ialah metode kepustakaan yang bersumber pada buku dan artikel ilmiah yang sesuai dengan diskursus ini. Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan penyebab konflik upaya konkret berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaiannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat tentang relevansi Pancasila dalam penyelesaian konflik tahun 1996 di Maumere.

Literatur Review

Pancasila merupakan ideologi bangsa yang memiliki nilai-nilai moral etis. Eksistensi Pancasila menjadi pilar dalam mengatasi beraneka persoalan di Indonesia baik persoalan masa lalu maupun masa kini. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebatas panduan pelaksanaan secara etik dan moral saja. Tetapi nilai Pancasila harus dihidupi oleh warga negara Indonesia sepanjang waktu. Nilai-nilai luhur Pencasila menjadi esensi dalam membangun nilai persatuan dan kesatuan antara masyarakat dan dijadikan masyarakat indonesia yang maju dan bermartabat. Oleh sebab itu, warga negara harus memelihara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi membangun kehidupan yang adil dan damai.

Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan supaya masyarakat Indonesia saling menghargai setiap hak individual tanpa ada sikap kekerasan dalam hidup bersama. Dewantara mengatakan bahwa sebagai rakyat dari suatu negara, satu bangsa yang tidak mungkin dipecah belah. Karena rakyat dan negara kita terpangku oleh satu alam dan satu zaman serta sekodrat dan satu masyarakat.

Peristiwa PKI (Partai Komunisme Indonesia) di Indonesia pada tahun 1965 merupakan suatu peristiwa tragis dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1965 terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Jendral Soeharto yang menggulingkan Presiden Sukarno dan membubarkan PKI. Kudeta ini dipicu oleh serangkaian peristiwa yang melibatkan perwira militer yang tidak puas dengan pemerintahan Soekarno. Pasca peristiwa ini terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap anggota PKI dan simpatisan komunis di seluruh Indonesia.

Penelitian ini, bertujuan untuk memperlengkapi penelitian terdahulu dengan mengambil fokus interpretasi tentang peran Pancasila sebagai ideologi negara. Muhammad Mona Adha 2022

Copyright (c) 2026. Darmawan Harefa.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

dalam penelitiannya yang berjudul Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. Penelitian itu menemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi fondasi dalam membangun nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Penelitian Muhammad Mona Adha bertujuan untuk menggali nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. Adha mengatakan bahwa masyarakat Indonesia perlu menampilkan sikap kejujuran, saling menghargai, keterbukaan, tanggung jawab dan bersikap adil.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh John C. Simon pada tahun 2020. Jhon C. Simon dalam penelitiannya yang berjudul "Memori Trauma dalam Film G30S/PKI: Sebuah Interpretasi Teologis" mengatakan bahwa tragedi dalam sejarah menimbulkan rasa sakit untuk tiap orang yang menjadi korban. Tragedi itu menimbulkan dendam pada korban dan penyesalan pada pihak yang lainnya. Tetapi penyesalan tidak cukup. Tetapi yang dibutuhkan adalah pertobatan yaitu keputusan untuk tidak mengulang kesalahan yang telah terjadi. Pertobatan adalah keputusan untuk masa depan. Pegangan kita adalah apa yang diwariskan oleh para pendiri bangsa: Pancasila sebagai filsafat dasar negara Republik Indonesia.

Persamaan kedua penelitian ini ialah menggali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi bangsa. Temuan dalam Penelitian John C. Simon memiliki relevansi dan menjadi tawaran yang harus diterapkan dalam menyelesaikan konflik pembunuhan massal pada tahun 1966 di Maumere. Penyesalan tidak cukup. Tetapi yang dibutuhkan adalah pertobatan yaitu sebuah keputusan supaya tidak mengulangi kesalahan yang telah terjadi pada masa lalu.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konsep Pancasila sebagai pilar dalam menangani konflik yang terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu memahami nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Persoalan yang telah terjadi pada masa lalu tidak hanya dengan sebuah penyesalan akan tetapi yang perlu dilakukan yang disebut dengan rekonsiliasi. Nilai keluhuran Pancasila telah mewariskan kepada kita sebagai warga negara Indonesia. Nilai-nilai keluhuran dan kemartabatan yang terkandung pada Pancasila perlu diterapkan dengan baik. Menurut Notonagoro Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pandangan hidup dan menjadi alat pemersatu bangsa. Sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" merupakan pedomaan hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Plato mengatakan adil merupakan kodrat perbuatan manusia yang terarah kepada yang lain. Dalam artian bahwa

Copyright (c) 2026. Darmawan Harefa.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

adil itu memiliki keterarahan kepada yang lain. Polemarchus mengatakan adil berarti berkata benar dan bertindak benar. Jika orang berkata mengenai sesuatu yang palsu atau menipu atau berbohong, dia jelas melakukan apa yang bertentangan dengan adil. Manusia harus bertindak benar. Jika dia berbuat jahat atau melukai orang, adil tidak ada di sana. Armada Riyanto, mengatakan adil menegaskan kebenaran sebagaimana sistem hidup bersama harus ditata sedemikian rupa. Tatanan disebut adil, ketika kehidupan dan keluhuran martabat setiap manusia dibela dan dimuliakan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kedudukan Pancasila Dalam Sejarah Bangsa Indonesia

Secara luas pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pada Pasal 1 Ketetapan MPR, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Presiden Soekarno dalam pidatonya, mengatakan Pancasila berperan penting sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi sebuah identitas bangsa Indonesia. Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa. Semua peraturan bangsa Indonesia bersumberkan pada Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila memancarkan nilai-nilai kebaikan keadilan, kedamaian, kesejahteraan, menghomati, menghargai antara sesama.

Pancasila yang dirumuskan Presiden Soekarno menjadi landasan filosofis bagi seluruh warga negara Indonesia terutama dalam mengatur dan menata cara hidup yang baik dalam hidup berbangsa. Setiap individu menerapkan nilai-nilai moral dan etika yang dijadikan sebagai pandangan hidup dalam membangun relasi dengan sesama. Dalam perumusan Pancasila, pada tanggal 1 Juni 1945 Presiden Soekarno mengungkapkan lima prinsip dasar pada Pancasila. *Pertama*, Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia); *Kedua*, Internasionalisme; *Ketiga*, dasar mufakat, dasar perwakilan, dan permusyawaratan; *Keempat*, kesejahteraan; *Kelima*, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedudukan Pancasila masa orde lama mengalami ideologisasi. Pancasila berusaha untuk dibangun dan dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya. Pada orde ini muncul oknum-oknum yang ingin menggantikan Pancasila dengan paham komunisme. Sementara pada masa era orde baru, kedudukan Pancasila semakin dipersulit yang ditandai dengan meletusnya gerakan 30S/PKI pada tahun 1965.

Copyright (c) 2026. Darmawan Harefa.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Pada bulan September 1965, menyusul kudeta PKI yang gagal, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 S/PKI. Lahirnya masa orde baru saat Soeharto dijabat sebagai Presiden bangsa Indonesia. Penerapan nila-nilai Pancasila dilakukan secara indoktrinatif dan birokratis yang kemudian mengakibatkan bukan lagi nilai-nilai Pancasila yang meresap ke dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi kemunafikan yang tumbuh subur dalam masyarakat.

Pengalaman masa orde lama memperlakukan Pancasila hanya sebagai retorika politik dan instrumen menggalang kekuasaan ternyata kemudian berlanjut pada masa orde baru. Masa orde lama Pancasila dimanipulasi menjadi kekuatan politik dalam bentuk bersatunya tiga kekuatan aliran yaitu nasionalisme, komunisme dan agama; Masa orde baru Pancasila disalahgunakan sebagai ideologi penguasa untuk memasung pluralisme dan mengekang kebebasan berpendapat masyarakat dengan dalih menjaga dan kesatuan bangsa. Pada masa reformasi nilai Pancasila hanya digunakan sebagai sarana atau instrumen dan alat kekuasaan untuk menguasai semua sumber kekayaan alam yang hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Pancasila disalahgunakan sebagai sarana untuk menciptakan kultus individu Soeharto dan sekaligus instrumen penindasan terhadap semua bentuk ancaman terhadap kekuasaannya. Kedudukan Pancasila pada masa orde baru pertama-tama bukan membawa perubahan, persaudaraan, kesejahteraan, dan ketentraman melainkan menciptakan perselisihan, permusuhan, penderitaan, kesedihan, dan kematian di antara sesama saudara bangsa.

2. Pembunuhan Massal Tahun 1966 Di Maumere

Menurut lembaran sejarah bangsa Indonesia, peristiwa pada tahun 1965-1966 merupakan suatu pristiwa tragis yang dihadapi bangsa. Di mana pada tahun 1965-1966 terjadi konflik pembunuhan massal yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia termasuk di Maumere, Flores Timur. Peristiwa ini merupakan bagian dari Gerakan 30 September 1965 yang berujung pada kudeta militer. Pembunuhan massal di Indonesia tahun 1965 adalah salah satu episode gelap bangsa Indonesia. Pembantaian massal terjadi secara bergelombang di Indonesia. Korban pembantaian massal tersebut adalah rakyat biasa yang tidak mengetahui dan tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa G30S/PKI. Sekian banyak orang ditangkap, disiksa dan dipenjarakan tanpa proses hukum yang adil. Sementara ada sebagaian besar masyarakat merasa kehilangan hak-hak dan mengalami penganianyaan fisik dan psikologis.

Konflik pembunuhan massal 1965 di Indonesia disebabkan oleh faktor partai politik yang berorientasi pada komunisme. Komunisme adalah sebuah paham ideologi politik yang menganggap semua barang atau materi adalah milik bersama tanpa ada barang milik pribadi. Kata komunisme berasal dari bahasa Latin *comunis* yang artinya milik bersama. Istilah ini berasal dari pemikiran Karl Marx yang dikenal dengan Marxisme. Partai Komunis Indonesia didirikan pada tanggal 23 Mei 1920 di Jawa Tengah,

Copyright (c) 2026. Darmawan Harefa.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Indonesia. Dan partai ini dipimpinan oleh D. N. Aidit. Dalam menjalankan tugasnya, D.N. Aidit berupaya untuk menunjukan sikap yang baik dengan merangkul golongan-golongan non komunisme.

Pada tahun 1965, situasi bangsa Indonesia sedang menghadapi situasi politik yang kompleks. Presiden Soekarno berada di puncak kekuasaan, tetapi pemerintahannya diwarnai oleh konflik politik dan ketegangan antara golongan militer dan golongan sipil. Peristiwa 30 September 1965, sekolompok perwira militer yang terkait dengan PKI melakukan kudeta militer. Mereka menculik beberapa petinggi Jendral dan kemudian di bunuh. Gerakan ini diduga dilakukan oleh kelompok PKI dengan tujuan untuk mengambil alih dalam mengatur negara. Mereka berusaha untuk menggantikan rezim militer dengan pemerintahan yang lebih pro-komunis.

Peristiwa G30S/PKI memicu reaksi keras dari militer dan pemerintah Indonesia. Soeharto, saat itu menjabat sebagai panglima angkatan darat, memimpin untuk menghentikan kudeta ini. Sebagai respons, militer melancarkan operasi penumpasam terhadap anggota PKI dan simpatisan mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya pembunuhan massal terhadap orang yang diduga sebagai bagian dari PKI. Terjadinya kudeta dan peng-kambing hitaman komunisme sebagai dalang terjadinya insiden yang dianggap pemberontakan pada tahun 1965. Peristiwa ini membawa kesengsaraan luar biasa bagi warga Indonesia dan anggota keluarga yang dituduh komunis. Jumlah korban pada peristiwa ini mencapai 500.000 jiwa sampai dua juta jiwa di bunuh setelah peristiwa Gerakan 30 September.

Peristiwa pembunuhan massal terjadi pada masa kepemimpinan presiden Soeharto. Sikap dan mentalitas Soeharto pada masa kepemimpinan masa orde baru ini amat mengerikan. Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan. Dalam masa kepemimpinannya, Soeharto berupaya untuk membersihkan dan menghilangkan semua anggota PKI termasuk di Maumere, Flores Timur mereka ditangkap, disiksa dan dibunuh.

Secara umum jumlah korban pembunuhan massal di Indonesia pada tahun 1965-1966 tidak diketahui secara pasti. Menurut *Facts Finding Commission* yang dibentuk setelah peristiwa berdarah di seluruh pelosok Indonesia tersebut, jumlah korban adalah 78.000 orang. Kopkamtib dalam salah satu laporannya menyebut satu juta jiwa orang. Sedangkan menurut Robert Cribb melaporlan bahwa jumlah korban pembunuhan massal tersebut 500.000 hingga tiga juta jiwa. Para korban pembunuhan massal yang dipandang sebagai PKI di dalamnya termasuk para petani buta huruf di dusun-dusun terpencil.

Kekerasan di Maumere pada tahun 1966 menjadi sebuah peristiwa yang tragis bagi masyarakat. Di mana mereka menyaksikan secara lansung kekerasan dan penindasan yang terjadi terhadap keluarganya sendiri. Tindakan kekerasan terhadap sesama dapat menghilangkan nilai persaudaraan, keharmonisan dalam tatanan hidup bersama. Dan kekerasan itu sendiri sangat bertentangan dengan kodrat hidup manusia. Manusia tidak diciptakan untuk menghidupi kekerasan

Copyright (c) 2026. Darmawan Harefa.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

melainkan cinta. Kekerasan merendahkan martabat manusia. Kekerasan menghadirkan kesemrawutan dan kengerian. Tindakan kekerasan masa lalu hendaknya dibenahi agar dapat mewujudkan keadilan bagi setiap individu.

3. Nilai-Nilai Pancasila Dalam Konteks Konflik Pembunuhan Massal Di Maumere

Dalam konteks konflik pembunuhan massal tahun 1966, nilai-nilai Pancasila memberikan landasan moral dan etika untuk menyelesaikan konflik. Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan memperlakukan semua orang dengan adil. Nilai ini mengajarkan untuk menghindari pelanggaran HAM dan tindakan yang merugikan martabat manusia. Setiap individu, termasuk korban konflik berhak diberlakukan dengan adil dan beradab. Manusia memiliki harkat dan martabat yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Dan manusia merupakan wujud dan kehadiran dari relasi-relasi antarmanusia yang memandang satu sama lain sebagai sesamanya yang layak dan harus dihormati.

Sila ketiga Pancasila menekankan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah nilai dasar yang sangat penting dalam konteks Indonesia yang terdiri dari beragam etnis, budaya agama dan bahasa. Nilai ini menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman yang ada. Sila persatuan bangsa Indonesia memberikan kerangka etika yang harus diikuti dalam menangani konflik dan masalah politik di Indonesia. Sejarah pembantaian tahun 1965-1966 adalah mengingat bahwa persatuan adalah aset berharga yang harus dijaga dengan baik dan menghindari segala tindakan yang mengecam hidup persatuan yang merugikan Hak Asasi Manusia.

Sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" berarti pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai suatu keadilan itu, pemerintah dan aparat penegak hukum Indonesia perlu menegakan hukum yang baik benar. Proses hukum harus berlaku adil terutama dalam menghadapi pelaku pembunuhan massal agar dapat bertindak dengan sikap kemanusiaan dan transparan. Semua individu termasuk pelaku kekerasan berhak mendapatkan perlakuan yang dalam dan proses hukum yang sesuai. Setiap individual memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati tanpa menindas dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

Dalam menangani konflik pembunuhan massal di Maumere, ini mencakup perlu memberi perlindungan hak-hak korban dan keluarga korban. Konflik pembantaian itu telah melanggar HAM yang serus dan menghilangkan nilai keadilan sosial. Secara konstitusional dan yuridis terikat untuk mematuhi ketentuan tentang HAM seperti yang dimuat dalam Pancasila yang menunjukan kemanusiaan yang adil dan beradab, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang

Copyright (c) 2026. Darmawan Harefa.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

mengadopsi *statuta Roma* dan konvensi internasional lain.

Dalam peraturan hukum tentang Hak Asasi Manusia dan pelanggaran HAM berat tercantum dengan jelas pada pasal 28 yang berbunyi; "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Peristiwa massa kelam bangsa Indonesia perlu melakukan suatu upaya untuk memperbaiki, membaharui untuk mencega terulangnya pelanggaran HAM berat, hal ini dapat dilakukan melalui mediasi sosialisasi, kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai HAM serta dengan melakukan penyampaian rekomendasi pembaruan-pembaruan di dalam istitusi-institusi publik.

4. Peran Pancasila Dalam Perdamaian Dan Rekonsiliasi Konflik Pembunuhan Massal Di Maumere Tahun 1966

a. Pancasila dan Pembunuhan Massal 1966

Konflik pembunuhan massal tahun 1966 di Indonesia terkait dengan periode peralihan politik yang melibatkan tumbangnya rezim Presiden Soekarno dan bangkitnya kekuasaan Soeharto. Konflik tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang kompleks pada masa itu. Adapun peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam konteks konflik 1966; *Pertama*, persatuan nasional. Salah satu prinsip utama Pancasila adalah persatuan Indonesia. Pancasila sebagai persatuan bangsa mengacu pada salah satu prinsip utama Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam prinsip ini menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keragaman yang ada dan menciptakan kebersamaan. Hal ini mau menekankan bahwa pentingnya menciptakan suasana yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang latar belakang etinis, budaya atau agama demi mewujudkan kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat. Dalam hubungan dengan situasi pada tahun 1966, Pancasila menjadi pijakan atau sebagai pilar untuk menyatukan bangsa yang terpecah akibat perpecahan politik ideologis. Prinsip persatuan nasional menciptakan dasar bagi upaya rekonsiliasi.

Kedua, keadilan sosial. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam semua aspek kehidupan masyarakat baik materil maupun spiritual. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa setiap pribadi berhak mendapat perlakuan adil dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Prinsip keadilan menjadi sebuah syarat mutlak bagi setiap manusia untuk dapat hidup saling menguntungkan dan tentunya sesuai dengan tujuan mendasar yakni menuju kebenaran sejati. Menurut Aristoteles, keadilan ialah kelayakan dalam tindakan manusia di mana kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Sehingga, bagi manusia yang tidak menjunjung keadilan tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan

Copyright (c) 2026. Darmawan Harefa.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

yang seharus dimiliki. Keadilan menjadi dasar yang berusaha menjadikan ketimpangan yang dialami masyarakat dapat mengalami perubahan menuju kesetaraan.

Prinsip keadilan sosial Pancasila memegang peranan penting dalam menangani ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang menjadi sumber konflik. Pancasila sebagai ideologi negara berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkrit dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya menjadi slogan saja. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi sebuah kewajiban yang harus dijalan dalam mensejahterahkan masyarakat Indonesia khususnya bagi para korban pembunuhan massal di Maumere tahun 1966. Gagasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tercermin dalam bersikap dan berprilaku dalam hidup berbangsa dan bernegara yang tercermin melalui realitas hidup.

b. Pancasila Dan Proses Rekonsiliasi

Dalam kasus konflik 1966, proses rekonsiliasi menjadi sangat penting untuk mengatasi trauma dan ketidaksetaraan yang diakibatkan oleh pembunuhan massal dan penganiayaan hak asasi manusia. Pancasila memberikan kerangka kerja yang dapat menjalankan proses rekonsiliasi yang inklusif dan berkelanjutan. Rekonsiliasi bukan berarti membangun perdamaian di atas kubur tertutup sejarah masa lalu. Akan tetapi rekonsiliasi sejati mengandaikan adanya proses penguakan fakta sejarah agar hak-hak para korban atas kebenaran dan keadilan dapat terpenuhi. Proses pemulihan martabat korban dapat terwujud sebagai syarat mutlak sebuah rekonsiliasi. Tidak ada rekonsiliasi sejati tanpa pengungkapan fakta dan pemulihan rasa adil sang korban.

Dalam proses rekonsiliasi harus menghormati hak-hak korban. Pancasila mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mencakup hak keadilan dan pemulihan. Eksistensi Pancasila memiliki nilai fundamental dan perekat dalam mengupaya perdamaian dan rekonsiliasi terkait dengan fenomena itu. Pancasila sebagai pilar dalam mengupayakan perdamaian dan rekonsiliasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, tertip, damai dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Pemulihan pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik pada Bab II dan Pasal 2 mengatakan bahwa penanganan konflik mencerminkan asas; kemanusiaan, hak

Copyright (c) 2026. Darmawan Harefa.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, kebhinneka-tunggal-ikaan, keadilan, keadilan.

Peristiwa kelam bangsa Indonesia perlu ditelusuri dan baharui dengan sikap yang adil dan damai. Negara bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil dan sejahtera.

D. Penutup

Pancasila memiliki nilai penting sebagai kerangka kerja ideologis dan filosofi negara yang mendukung perdamaian, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Pancasila dengan lima prinsip dasarnya yang mencakup Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi pilar dalam mengatasi konflik dan mencapai rekonsiliasi. Prinsip-prinsip Pancasila hendak menawarkan persatuan nasional, keadilan sosial, toleransi, dialog, dan demokrasi semua nilai-nilai yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian. Dalam konteks konflik pembunuhan massal tahun 1966 di Maumere, Pancasila berperan penting dalam membantu proses rekonsiliasi dan penyelesaian konflik dengan mengedepankan perdamaian, keadilan, dan persatuan. Meskipun proses ini memakan waktu yang cukup lama. Tetapi, Pancasila tetap menjadi pedoman penting dalam mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di Indonesia. Rekonsiliasi dan penyelesaian konflik adalah proses yang kompleks dan memerlukan kerja keras, komitmen, dan partisipasi dari berbagai pihak.

E. Daftar Pustaka

Ahda, Muhammad Mona. 2022. Kekuatan Nilai-nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia, *Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*,Vol. 15, No.1.

Antari Luh Putuh, Swandewi. 2020. Implementasi Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Jurnal Widyadari*, Vol. 21, No. 2.

Burlian, Paisol. 2020. Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila, Jurnal Doctrina, Vol.5. No. 2.

Daud Brian, dkk. 2019.Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu dan Rekonsiliasi Nasional di Indonesia. *Jurnal Pandecta*, Vol. 13, No. 2.

Copyright (c) 2026. Darmawan Harefa.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Dewi, Sandra dkk. 2018. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Baru dan Era Reformasi. Jurnal PPKn dan Hukum, Vol. 13, No.1.

Hufron. 2020. Aktualisasi Negara Hukum Pancasila Dalam Memberantas Komunisme Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Keadilan*. Vol. 13, No.1.

Kristiadi, J. 2015. *Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Bermartabat Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.

Nardiman. 2022. *Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Alumni.

Otto Gusti Madung. 2015. "*Ritus Rekonsiliasi Orang Lembata, Politik Anamnetis dan Prinsip Persatuan"* Kearifan Lokal Pancasila; Butir-butir Filsafat Keindonesiaan, Armada Riyanto, et al (eds.), Yogyakarta: Kanisius.

Pambudi, Kukuh Setyo. 2017. Penelitian Studi Kasus Fenomenologi Persepsi Keadilan Pelaku Pembunuhan Angota PKI 1965. *Jurnal Sains Psikologi*, Vol. 6, No. 1.

Permata, 2015. Harsa Gerakan 30 September 1965 Dalam Perspektif Filsafat Sejarah Marsixme, *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 2.

Riyanto, Armada. 2017. *Pancasila Di Ruang Keseharian*. Mengabdi Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural, Alphons Tjatur Raharsuo, et al (eds.), Malang: STFT Widya Sasana.

Riyanto, Armada. 2013. *Menjadi mencintai; Berfilsafat Teologis Sehari-hari*, Yogyakarta: Kanisius.

Roosa, Jhon. 2008. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Jakarta: Hasta Mitra.

Saeng, Valentinus. 2017. *Revitalisasi Pancasila Demi Indonesia.* Mengabdi Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural, Alphons Tjatur Raharsuo, et al (eds.), Malang: STFT Widya Sasana.

Safira, Herlinda. 2022. Rekonstruksi KKR Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban

Copyright (c) 2026. Darmawan Harefa.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Pelanggaran HAM Berat. *Jurnal Mimbar*, Vol. 1, No.1.

Samosir, Osbin. 2022. Pancasila Dan Tantangan Demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 2, No. 3.

Simon, Jhon C. 2021. Memori Trauma Dalam Film G30S/PKI: Sebuah Interpretasi Teologis. *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1, No. 2.

Soedarmo, Runalan. 2014. Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia 1948-1965. *Jurnal Artefak*, Vol. 2, No. 1.

Solzhenitsyn, Alexander. 2015. Tolak Tipu, Lawan Lupa: Pembantaian Massal 1965-1966, *Jurnal Wacana Dan Kebudayaan*, Vol. 14, No.1

Suryanto, Fransiskus Rino. 2023. Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno. *Jurnal Penelitian Pancasila dan kewarganegaraan*, Vol 3, No. 6.

Copyright (c) 2026. Darmawan Harefa.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.